



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JULITA INDAH
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT PENGADAAN TRANSMISI, GARDU INDUK, DAN MATERIAL TERPUSAT
3. NHK : 198395

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 4.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 57 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 51 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/71 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
6. Tanah Seluas 70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 400.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN CAMRY 2.5V AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 15.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 350.000.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 5.465.000.000****III. HUTANG****Rp. ----**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.465.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.